

LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINASTENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2023 dapat selesai tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan, saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata, terimakasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2023 ini.

Denpasar, Januari 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar, /s/

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19640913 199303 1006

LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Struktur Organisasi	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	17
2.4 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	19
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	27
3.3 Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran-saran	35

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- d. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023
- f. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
- g. Rencana Aksi Perubahan Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
- h. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- i. Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2023
- j. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Sasaran 1
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Sasaran 1
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Sasaran 2
Tabel 3.4	Program dan Kegiatan Sasaran 2
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Sasaran 3
Tabel 3.6	Program dan Kegiatan Sasaran 3
Tabel 3.7	Program dan Kegiatan Tahun 2023
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Anggaran 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar bukan hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan tersusunnya LKjIP ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek - praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan maupun kekurangan dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Sasaran dan target tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar adalah Mengurangi Pengangguran. Selain itu untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar melaksanakan beberapa program, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel. Dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut setiap instansi pemerintah membuat Rencana Strategis untuk masa lima tahun serta menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel. Dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut setiap instansi pemerintah membuat Rencana Strategis untuk masa lima tahun serta menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2023 sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2023 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

1.3 Isu Strategis

Isu Strategi Indonesia saat ini baru dapat mengisi pangsa pasar kerja luar negeri yang tergolong rendah kualifikasinya. Kualifikasi ini sesuai dengan kondisi pasar kerja Indonesia yang ditandai setidaknya oleh pasar kerja yang bersifat dualistik, antara lapangan kerja formal dan informal.

Tenaga kerja Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja mengakibatkan permasalahan hukum di negara penempatan dan banyak tenaga migran tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan keselamatannya. Selain tata kelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam melindungi pekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan hukum terhadap kebijakan migrasi di Negara-negara tujuan menempatkan pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah.

Adapun isu strategis terhadap ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:

1. Tenaga Kerja Tidak Berkompeten dan Tidak Bersertifikasi
2. Perluasan Kesempatan Kerja Rendah
3. Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Belum Memadai

Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap permasalahan dan solusi yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Permasalahan

1. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan kurangnya penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.
2. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan kurangnya kesadaran untuk melapor kembali ke Dinas Tenaga kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar setelah diterima bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah.
3. Rendahnya SDM yang berkompentensi dan bersertifikasi.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja serta hubungan industrial.

Solusi

1. Menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja, baik berupa penyelenggaraan bursa kerja, informasi lowongan pekerjaan, pengembangan proyek-proyek pemagangan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama di Bidang Ketenagakerjaan antar sesama pemangku kepentingan yang berperan dalam bidang ketenagakerjaan melalui penyediaan informasi dan kordinasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Melakukan sosialisasi pentingnya pencari kerja dalam memanfaatkan kartu AK/I sebagai sumber data ketenagakerjaan bagi pemerintah dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, meningkatkan pengembangan layanan atau memperbaharui sistem aplikasi pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) agar berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, kemudahan dalam pengoperasian AK/I, meningkatkan fasilitas atau dalam hal pemberian informasi terkini bagi pelayanan AK/I.
3. Mendorong agar setiap LPKS/SMK menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mencetak tenaga kerja atau lulusannya agar memiliki sertifikasi kompetensi dan melakukan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
4. Mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Perwali Kota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Pamong Praja. Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
2. Sekretariat
 - a. Sekretaris Dinas
 - b. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - c. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda
4. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda
5. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Hubungan Industrial
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
6. Kelompok jabatan Fungsional
 - a. Mediator
 - b. Pengantar Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Ketenagakerjaan
- d. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Dinas.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai media penggambaran pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar selama tahun 2023. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2023

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja organisasi, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Menjelaskan tinjauan umum dari LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2023, permasalahan dan kendala umum yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang

Lampiran :

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, Pengukuran Kinerja Tahun 2023, Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2023, Realisasi Kegiatan Tahun 2023, Rencana Aksi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar merupakan kerangka pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk periode waktu 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu:

VISI

“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

MISI

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. **Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.**
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu pada misi 4 yaitu : “Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana”

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,62	7,42	4,18	2,83	2,81	2,79	2,79

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	85%	87%	88%	89%	90%	90%	90%
2	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Persen	83%	88%	91%	93%	96%	99%	99%
3	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Persen	32.9%	35%	36%	37%	38%	39%	39%
4	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	56%	60%	61%	63%	65%	67%	67%
5	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	54%	57%	59%	61%	63%	64%	64%

2.1.3 Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- b. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Program Penempatan Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- b. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Program Hubungan Industrial

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

- OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
- Tugas Pokok : 1 Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan Walikota
- Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
4 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengurangi Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan terlampir.

2.4 Perjanjian Kinerja

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang menghasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk Tahun 2023, secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 (terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun dokumen pengukuran kinerja triwulan dan tahunan (terlampir).

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2023. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran Indikator Kinerja Utama (Tingkat Pengangguran Terbuka) dapat digambarkan sebagai berikut :

Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	4.11	3.94	2.52
Kab. Tabanan	3.94	3.83	2.64
Kab. Badung	6.93	6.87	2.72
Kab. Gianyar	6.90	6.78	2.96
Kab. Klungkung	5.35	1.96	1.29
Kab. Bangli	1.80	0.76	0.75
Kab. Karangasem	2.32	3.09	2.61
Kab. Buleleng	5.38	5.20	3.60
Kota Denpasar	7.02	5.08	2.85
Provinsi Bali	5.37	4.80	2.69

Sumber : BPS Provinsi Bali

Source Url :

<https://bali.bps.go.id/indicator/6/288/1/persentase-pengangguran-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>

Pada tahun 2022 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar 5,08% dan pada tahun 2023 sebesar 2,85% sehingga dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar mengalami penurunan sebesar 2,23%.

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, indikator kinerjanya dapat digambarkan pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama	Target 2023 (RPJMD)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	88%	67%	55%
2. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	91%	63%	77%



Pada Indikator Kinerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan uji kompetensi sebanyak 3.602 orang dan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 6.561 orang sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi mencapai 55% dan pada indikator kinerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 513 orang dan jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan sebanyak 664 orang sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan mencapai 77%. Kegiatan ini bertujuan

untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan berkompeten melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga mampu berkompetisi baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja telah dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 2 Kegiatan yang dapat digambarkan pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Sasaran	Program	Kegiatan
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sasaran 2 : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesempatan Kerja, indikator kinerjanya dapat digambarkan pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama	Target 2023 (RPJMD)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	36%	62%	54,1%



Kegiatan Fasilitasi Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya bagi pencari kerja terkait

kesempatan kerja, lowongan kerja maupun even – even berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvassing maupun bimbingan penyuluhan jabatan. Dalam penyebarluasan informasi ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan JOB FAIR, Pasar Kerja Festival dan Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Berdasarkan Database ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sampai dengan bulan desember 2023 maka diperoleh data pencari kerja terdaftar sebanyak 2.320 orang dan pencari kerja

terdaftar yang telah ditempatkan sebanyak 1.256 orang sehingga persentase penempatan pada tahun 2023 sebesar 54,1%.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja telah dilaksanakan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 4 Kegiatan Pendukung yang dapat digambarkan pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4

Sasaran	Program	Kegiatan
Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antarkerja di Daerah Kab/Kota
		Pengelolaan informasi pasar kerja
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial, indikator kinerjanya dapat digambarkan pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Utama	Target 2023 (RPJMD)	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1. Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	61%	36%	39%
2. Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	59%	8.33%	102%

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi dan peranan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis yang ada di perusahaan serta kerja sama yang baik antara pekerja dengan pengusaha sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Adanya kasus Hubungan Industrial menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan. Pada tahun 2023 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menerima 23 kasus hubungan industrial dan yang sudah dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 9 kasus, sehingga apabila dipersentasekan target capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Besaran Kasus

Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mencapai 39%. Serta jumlah peserta jamsostek aktif di Kota Denpasar sebanyak 434.445 orang dan jumlah seluruh pekerja di Kota Denpasar sebanyak 422.382 orang sehingga Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 102%.



Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial telah dilaksanakan Program Hubungan Industrial dengan 2 Kegiatan Pendukung yang dapat digambarkan dengan Tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6

Sasaran	Program	Kegiatan
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

3.2.2 Analisis dan Evaluasi Kinerja Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2023. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2023

Tabel 3.7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi				
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	675 Orang	675 Orang	100%
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	56 LPKS	56 LPKS	100%

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir HUB)	553 Orang	661 orang	119%
		JOB Fair/ Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui JOB Fair/Bursa Kerja	425 Orang	366 Orang	86%
		Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota				
		Pelayanan antar kerja	Jumlah buku berita pasar kerja	300 Buku	300 Buku	100%
			Jumlah bursa kerja khusus yang termonitoring	20 BKK	20 BKK	100%
			Jumlah perusahaan yang termonitoring	30 Perusahaan	30 Perusahaan	100%
			Terlatihnya fasilitator disabilitas	15 orang	15 orang	100%
			Terlaksananya ISO 9001 : 2015 dan ISO 270001	1 Sertifikat ISO	1 Sertifikat ISO	100%

		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	500 Orang	500 Orang	100%
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota				
		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	300 Orang	336 Orang	112%
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) termonitoring	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%

Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembang an Hubungan Industrial	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota				
	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Penyelenggara an Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupater/ Kota				
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	35 Perkara	24 Perkara	75%

	Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	55 Perusaha an	55 Perusahaan	100%
--	---	---	----------------------	---------------	------

3.3 Akuntabilitas Keuangan

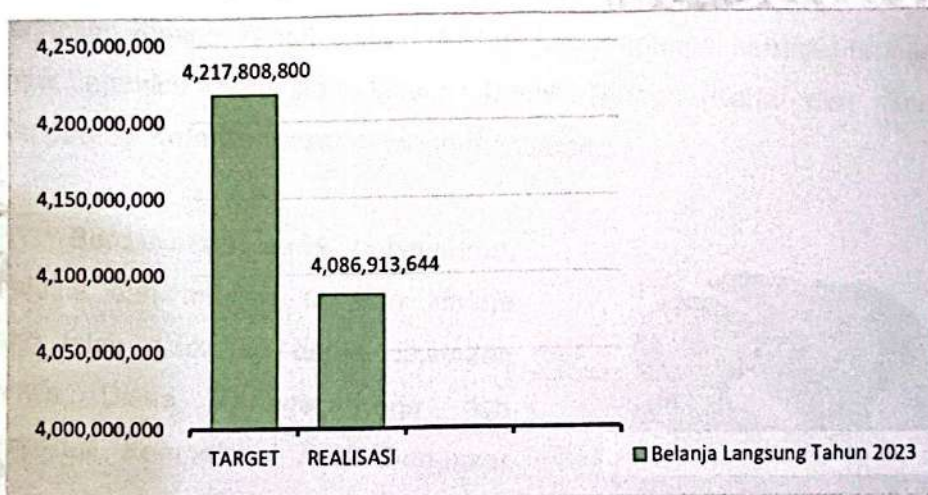
Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada table 3.8 sebagai berikut

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	2.615.738.600	2.541.994.450	97%
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kewirausahaan	31.828.500	29.159.100	92%

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota	465.688.750	455.087.869	98%
		Pengelolaan informasi pasar kerja	518.088.200	514.078.850	99%
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	80.391.000	78.935.125	98%
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	82.537.500	59.857.500	72%
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota	246.427.200	236.626.700	96%

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	177.109.050	171.174.050	97%
TOTAL	4.217.808.800	4.086.913.644	97%



1. Dari 3 (Tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 97 %.
2. Terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang daya serap keuangannya rata-rata diatas 95%
3. Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2023 merupakan realisasi pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi kepada Walikota Denpasar. LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP ini juga berfungsi sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar di tahun mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada. Dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 daya serap anggaran mencapai 97%



4.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang antara lain :

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan hasil dari evaluasi analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut outcomes program dan output kegiatan.
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai yang mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, sehingga dapat dipersiapkan strategi – strategi guna meminimalisir hambatan – hambatan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2023 ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran yang akan datang demi peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar .



LAMPIRAN

LKIP DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR 36



**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

**Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar,
Telp. 0361- 9075751
<https://tenagakerja.denpasarkota.go.id/>**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

**DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR
TAHUN 2021**

Tugas Pokok

: 1 Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

- 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
- 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketenagakerjaan
- 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
- 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengurangi Angka Pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	

Pt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

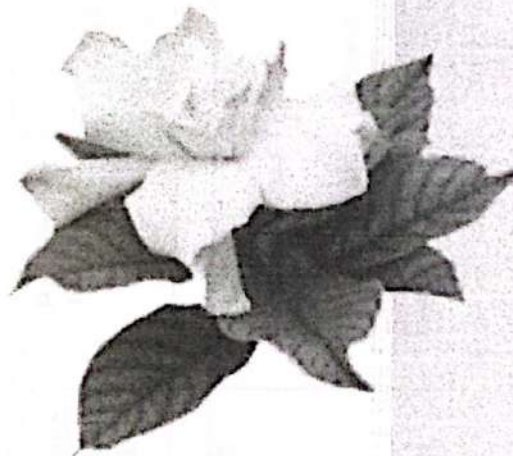


Ir. I Made Widharta, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19650721 199603 1 003

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)**



**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2023

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Sasaran			Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan				Ket				
Uraian	Indikator	Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
1	2	3		5	6	7	8	9				
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	91%	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja							
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	88%	1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	430	


				2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	-	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	56	
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	36%	2	Program Penempatan Tenaga Kerja							
				1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir HUB)	orang	553	
						2	JOB Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui JOB Fair/Bursa Kerja	orang	425	
				2	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1	Pelayanan antar kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan AKL	orang	85	

				2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	orang	450	
			3	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	orang	350
			4	Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) termonitorting	Perusahaan	50

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	<p>Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)</p> <p>Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan</p>	<p>61%</p> <p>59%</p>	<p>3 Program Hubungan Industrial</p> <p>1 Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1 Penyelenggara an Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan</p> <p>1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah</p>	<p>Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan</p> <p>Jumlah Perkara Perselisihan tang terselesaikan</p>	<p>Laporan</p> <p>Perkara</p>	<p>5</p> <p>35</p>		

					2	Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	Perusahaan	55	
--	--	--	--	--	---	---	---	------------	----	--

Denpasar, Desember 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar


Ir. Nyoman Nburah Jimmy Sidharta W. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA

**DINAS TENAGA KERJA DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

TAHUN 2023



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE



Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. I

Pembina Utama Muda

NIP. 19640913 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA
DENPASAR**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.434.296.594.00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1.679.067.100.00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 712.305.450.00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp. 414.269.450.00	PAD, DAU
Jumlah	Rp. 10.239.938.594.00	

Walikota Denpasar

(Signature)

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

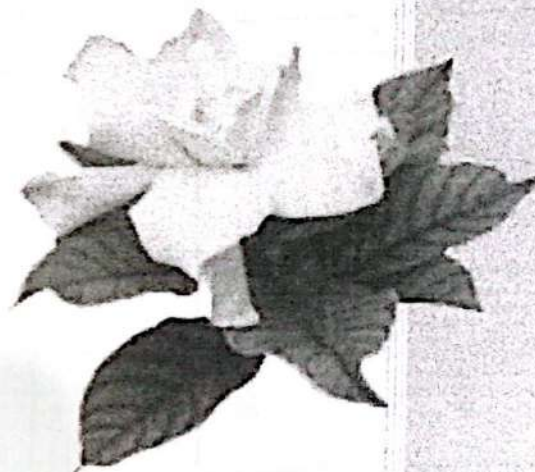


Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**PERUBAHAN RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)**



**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

2023

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2023

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Sasaran			Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan				Ket	
Uraian	Indikator	Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3		5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	91%	1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	675
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	88%	1 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					

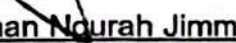
				2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	-	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	56	
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	36%	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir HUB)	orang	553	
				1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2	JOB Fair/Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui JOB Fair/Bursa Kerja	orang	425	
				2	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1	Pelayanan antar kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan AKL	orang	85	

					2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	orang	450	
			3	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	orang	300	
			4	Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA) termonitorting	Perusahaan	50	

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	61%	3	Program Hubungan Industrial					
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	59%	1	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	Laporan	5
				2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	35

					2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	Perusahaan	55	
--	--	--	--	--	---	---	---	------------	----	--

Denpasar, Desember 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar


Ir. Nyoman Nourah Jimmy Sidharta W, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

**DINAS TENAGA KERJA DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

TAHUN 2023



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

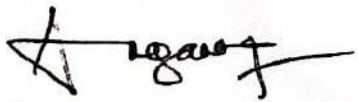
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

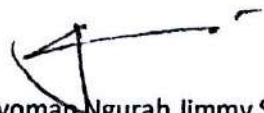
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Denpasar, 10 Oktober 2023

Pihak Pertama


I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

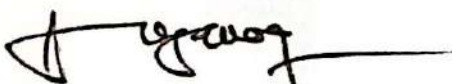

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA
DENPASAR**

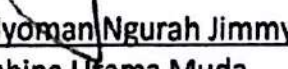
NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,18 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.667.264.594.00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.647.567.100.00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 1.146.705.450.00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp. 423.536.250.00	PAD, DAU
Jumlah	Rp. 11.885.073.394.00	

Walikota Denpasar 


I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 10 Oktober 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar


Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006



PENGUKURAN KINERJA (PK)

**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

DENPASAR 2023

PENGUKURAN KINERJA


OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
Tahun : 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,18	2,85	146%

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 4.217.808.800.00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 : Rp. 4.086.913.644.00

Denpasar, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar


Ir. Nyoman Nourah Jimmy Sidharta W. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
Tahun : 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERTAHUN	REALISASI S/D TRIWULAN I	REALISASI S/D TRIWULAN II	REALISASI S/D TRIWULAN III	REALISASI S/D TRIWULAN IV	% CAPAIAN
Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,18	5,08	5,08	5,08	2,85	2,85

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 4.217.808.800.00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023 : Rp. 4.086.913.644.00

Denpasar, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar


Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

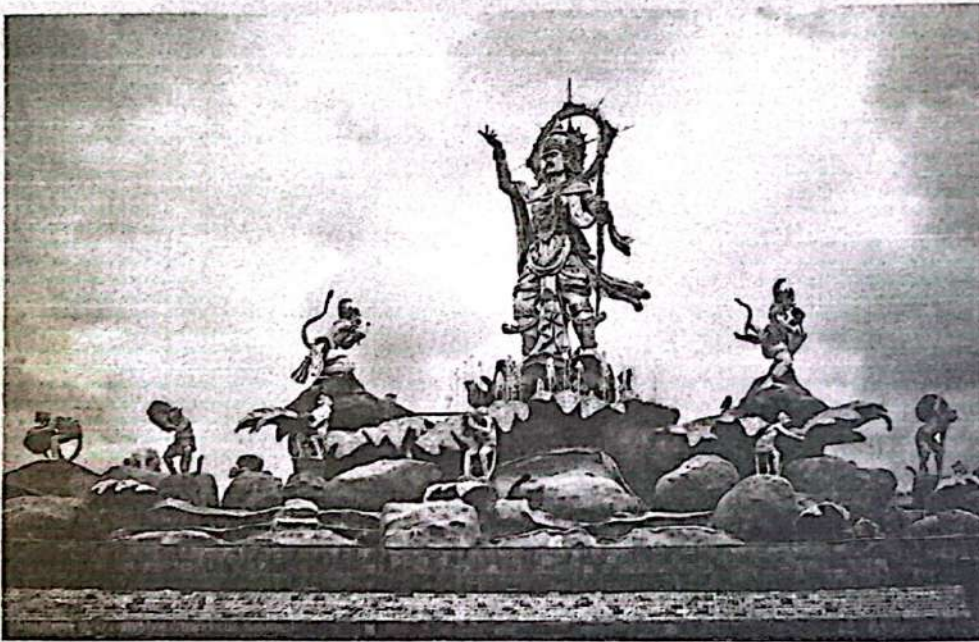
PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA AKSI

TRIWULAN

DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR



TAHUN 2023

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTTIFIKASI KOMPETENSI
TAHUN 2023**

10.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program / Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW1	TW2	TW3	TW4		Uraian	Indikator Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi					Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja			Rp. 1.679.067.100	Bidang Pembinaan dan Pelatihan
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan									
				210 orang	220 orang		Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses Pelaksanaan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Rp. 1.647.238.600	

		14 LPKS	14 LPKS	14 LPKS	14 LPKS		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Rp. 31.828.500	
Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan						Program penempatan tenaga kerja		Rp. 712.305.450	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
			85 orang				Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	
		250	200 Orang			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Rp. 48.001.250	
	139 orang	139 orang	139 orang	139 orang	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Rp. 230.762.500		
			40 Perusahaan				Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui JOB FAIR/ Bursa Kerja	Rp. 187.325.700	

				7 P3MI	8 P3MI		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Rp. 30.641.000	
				25 Perusahaan	25 Perusahaan		Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) Termonitoring	Rp. 33.037.500	
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama					Program Hubungan Industrial			Rp. 414.269.450	Bidang Hubungan Industrial
		Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Perlindungan -									

	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan									
		20	54	56	30	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Rp. 237.160.400	
		5	12	13	5	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Rp. 52.930.000	

			15	15	15	10		Penyelenggara an Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Rp. 124.179.050	
--	--	--	----	----	----	----	--	--	---	--------------------	--

Denpasar, 30 Desember 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar


Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006